

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Banjarbaru
Nomor : 188.4.43/27/X/DPRD/2020
Tanggal : 26 Oktober 2020

DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
(PROPEMPERDA) KOTA BANJARBARU TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	JUDUL RAPERDA	KETERANGAN
1.	Raperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Tahunan Anggaran 2020	Raperda Kumulatif terbuka
2.	Raperda Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021	Raperda Kumulatif terbuka
3.	Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2022	Raperda Kumulatif terbuka
4.	Kerjasama Daerah.	Raperda Baru diusulkan untuk payung hukum penyelenggaraan kerjasama Daerah
5.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 25 Tahun 2011 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Raperda Perubahan Diusulkan karena: <ul style="list-style-type: none"> • Perbedaan Tarif retribusi jasa ketatausahaan antara Perda No. 25 Tahun 2011 dengan PP Nomor 15 Tahun 2016 • Perubahan Bukti Uji Berkala.
6.	Bantuan Hukum	Raperda baru Diusulkan karena : <ul style="list-style-type: none"> • Amanat Undang-undang • Selama ini bantuan hukum belum menyentuh masyarakat umum.
7.	Rencana Tata Ruang Wilayah	Raperda Baru Diusulkan Karena sesuai dengan perkembangan Kota Banjarbaru
8.	Perubahan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 tahun 2015 Tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.	Raperda Perubahan Diusulkan oleh Dinas PUPR karena adanya UU Nomor 2 Tahun 2017 sehingga Perda Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2015 tentang izin usaha jasa konstruksi sudah tidak sesuai
9.	Retribusi Pelayanan Pemakaman	Raperda Baru diusulkan oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman karena: Belum ada Payung hukum dalam penarikan retribusi Dan amanat dari Undang-undang 28 Tahun 2009

NO.	JUDUL RAPERDA	KETERANGAN
10.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2011 Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Bidang Perikanan.	Raperda Perubahan diusulkan oleh DKPPP karena adanya Perubahan Struktur retribusi dalam raperda lama
11.	Retribusi Pemakaian tempat Olah Raga, Sarana Hiburan Dan Fasilitas Lainnya	Raperda Perubahan diusulkan Oleh Disporabudpar karena adanya penambahan fasilitas milik pemerintah yang belum diatur mengenai tarif retribusi, serta penyesuaian terhadap struktur retribusi dan tarif retribusi
12.	Penyelenggaraan Penanaman Modal	Raperda Baru diusulkan Karena sebagai payung hukum dalam penyelenggaraan Penanaman Modal sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana yang telah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penanaman Modal
13.	Fasilitas Pesantren	Raperda Baru diusulkan diharapkan dengan adanya Perda ini peningkatan fasilitas pesantren dari pembinaan, pemberdayaan dan fasilitas diperhatikan. Dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni UU No 18 Tahun 2019 yang salah satu poinnya menjelaskan bahwa Pemerintah dapat memfasilitasi penyelenggaraan pesantren seperti sarana prasarana dan pembinaan.
14.	Jaringan Utilitas Terpadu	Raperda Baru diusulkan bahwa dengan makin meningkatnya perkembangan pembangunan Kota Banjarbaru diperlukan jaringan utilitas sebagai fasilitas kelengkapan kota yang lengkap dan modern.

NO.	JUDUL RAPERDA	KETERANGAN
		Agar tercipta keterpaduan perencanaan dalam penempatan jaringan utilitas, maka perlu dilakukan penataan serta pengendalian pembangunan jaringan utilitas secara terpadu agar sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kota Banjarbaru
15.	Prototipe Bangunan Pemerintah dan Swasta Bernuansa Khas Banjar	Raperda Baru diusulkan agar setiap bangunan pemerintah dan swasta didesain sesuai kekhasan daerah.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJARBARU
KETUA,



[Signature]
JADLIANSYAH, SH., MH

WAKIL KETUA,

[Signature]

Drs. H. NAPSIANI SAMANDI, M.AP